

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Legislasi PERDES dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Desa Ngadirenggo kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)” ini ditulis oleh **L.M Al-Farihah**, NIM. 17104163037, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Fasih), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dibimbing oleh Dr. H. M. Darin ‘Arif Muallifin S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Legislasi, Peraturan Desa, *Fiqih Siyasah Dusturiyah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap ketidak tepatan proses legislasi PERDES di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Hal ini disebabkan karena menurut pandangan masyarakat para pembuat PERDES belum seluruhnya mengerti aturan pembuatan naskah akademik, aturan pelaksanaan *legal drafting* dan Administrasi Pemerintahan dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun *Fiqih Siyasah*. Sejatinya didalam aturan-aturan ini memiliki dasar untuk menghasilkan sebuah produk perundang-undangan yang baik dan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Jika dalam pembuatan PERDES tidak sesuai dengan aturan yang ada di atasnya (*lex superior derogat lex inferior*) dalam substansi dan prosesnya maka bisa berakibat PERDES tersebut batal demi hukum. Hal ini merupakan hal yang sangat fatal apabila benar-benar terjadi karena merupakan aturan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat desa yang merupakan unit terkecil dari sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Realita seperti ini menjadi penting untuk dibicarakan karena menyangkut kemaslahatan hidup banyak orang dan supaya mendapat penyelesaian atas apa yang telah terjadi.

Fokus penelitian dalam Skripsi ini adalah : 1. Bagaimana proses legislasi PERDES di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. 2. Bagaimana proses legislasi PERDES di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Bagaimana proses legislasi PERDES di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar berdasarkan Fiqih Siyasah.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apakah legislasi PERDES di Desa Ngadirenggo selaras dengan peraturan yang ada. 2. Untuk mengetahui proses pembuatan PERDES oleh perangkat Desa Ngadirenggo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Untuk mengetahui proses pembuatan PERDES oleh perangkat Desa Ngadirenggo berdasarkan Fiqih Siyasah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian legislasi PERDES di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. (1) Pelaksanaan legislasi PERDES dimulai dengan : a) Musdus (musyawarah dusun) disini masukan dari satu persatu masyarakat ditampung oleh pemerintah desa, BPD, pemuka agama dan pemuka masyarakat. b) Musdes (musyawarah desa) dalam musyawarah desa seluruh masukan yang

diterima dari musdus dimusyawarahkan kembali oleh pemerintah desa, BPD, pemuka agama dan pemuka masyarakat kemudian diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi agar tidak keluar dari koridor dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemuka agama dalam pembentukan PERDES desa Ngadirenggo bertugas memberikan masukan dengan merujuk kepada *Fiqih* Siyash dalam beberapa bab. c) Rancangan PERDES hasil dari musyawarah desa kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencari masukan dari masyarakat tentang substansinya. Ketika ada masukan yang kontra maka akan direvisi kembali. d) Ra-PERDES yang telah disosialisasikan kemudian akan ditulis ulang guna diajukan ke lembaga yang lebih tinggi yakni kecamatan untuk mendapatkan persetujuan. e) Ra-PERDES yang telah disahkan menjadi PERDES dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan seluruh masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran masyarakat bisa melaporkan kepada BPD untuk kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah desa. (2) Pelaksanaan legislasi PERDES perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai, dilaksanakan dengan memulai musyawarah yang berdasarkan pada aspirasi rakyat, aturan pembuatan perundang-undangan dan administrasi pemerintahan. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan Ra-PERDES sesuai prosedur, hal ini tidak luput dari aturan yang menyatakan bahwa substansi PERDES tidak boleh didasarkan pada kepentingan individu dan golongan tetapi harus memuat kepentingan orang banyak. Substansi dalam PERDES desa Ngadirenggo juga telah memuat pasal-pasal yang sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang

agar tidak menimbulkan konflik pada pelaksanaannya. Pelaksanaan PERDES desa Ngadirenggo dipantau oleh masyarakat dan masyarakat berhak melaporkan kepada BPD apabila ada pelanggaran. (3) Pelaksanaan legislasi PERDES di desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam perspektif *fiqih siyasah* telah sesuai dan proses pemaksimalannya masih dalam proses. Hal ini dapat ditinjau dari kinerja pemerintah desa dan BPD sebagai *ahl al-hal wa al-aqd* ketika menampung aspirasi masyarakat dan menjadi rujukan dalam berbagai macam masalah termasuk dalam pembuatan PERDES. Dalam substansinya sendiri para pembuatan PERDES juga telah merujuk pada Q.S Syura ayat 38 yang menerangkan bahwa para pemimpin hendaknya bermusyawarah dalam menentukan sebuah perkara yang bersangkutan dengan kepentingan rakyat agar keputusan yang muncul bisa maslahat.

ABSTRACT

The thesis with the title "The Legislation of Village Regulation in Perspective of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and *Fiqh Siyasah* (Case Study in Ngadirenggo Village Wlingi Blitar)" written by **L.M Al-Farihah**, Register Number 17104163037, Department of State Administration Law, Faculty of Sharia and Law Science, State Islamic Institute of Tulungagung, Advisor: Dr. H. M. Darin ' Arif Muallifin S.H., M.Hum.

Keywords: Legislation, Village Regulations, *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

This research is motivated by public unrest about the inaccuracy of the village regulation legislation process in Ngadirenggo Village Wlingi Blitar. This is because according to the view of the people the village regulation makers do not fully understand the rules of making academic texts, the rules of implementing legal drafting and Government Administration within the scope of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and *Fiqh Siyasah*. In fact, these rules have the basis for producing a good legal product and in accordance with the rules set by the government. If the making of village regulation is not in accordance with the rules above (*lex superior derogat lex inferior*) in substance and process, then the village regulation could be null and void. This is a very fatal thing if it really happens because it is a rule that is in direct contact with the life of the village community which is the smallest unit of the government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Reality like this is important to talk about because it involves the benefit of many people's lives and to get a solution for what has happened.

The focuses of the research in this thesis are: 1. How is the process of legislation village regulation in Ngadirenggo Village Wlingi Blitar. 2. What is the

village regulation legislation process in Ngadirenggo Village Wlingi Blitar based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. 3. What is the village regulation legislation process in Ngadirenggo Village Wlingi Blitar based on the *Fiqh Siyasah*.

As for the objectives of this research are: 1. To find out whether the village regulation legislation in Ngadirenggo Village is in line with existing regulations. 2. To find out the process of making village regulation by the Ngadirenggo Village apparatus based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. 3. To find out the process of making village regulation by the Ngadirenggo Village apparatus based on the *Fiqh Siyasah*.

The research method used was descriptive qualitative research using a sociological juridical approach. In this research the data collection techniques used were observation, interviews and documentation using data analysis, data presentation and conclusion drawing.

The research results of village regulation legislation in Ngadirenggo Village Wlingi Blitar. (1) The implementation of village regulation legislation begins with: a) hamlet discussion here input from one by one the community is accommodated by the village government, BPD, religious leaders and community leaders. b) village discussion in village deliberations all input received from the Musdus is discussed again by the village government, BPD, religious leaders and community leaders and then harmonized with higher regulations so as not to get out of the corridor and the principles of the formation of legislation. Religious

leaders in the formation of the Ngadirenggo village village regulation have the duty to provide input by referring to the *Fiqh Siyasa* in several chapters. c) The draft village regulation results from village deliberations are then disseminated to the community to seek input from the community about its substance. When there are counter inputs, it will be revised again. d) Village regulation planning that have been socialized will then be rewritten to be submitted to a higher institution, namely the for approval. e) Village regulation planning which has been ratified as village regulation is implemented by the village government and the whole community. If a violation occurs, the community can report it to the BPD for further action by the village government. (2) The implementation of village regulation legislation from the perspective of Law Number 6 of 2014 concerning Villages shows that the implementation is appropriate, carried out by starting deliberations based on people's aspirations, rules for making legislation and government administration. Then proceed with the village regulation planning submission according to the procedure, this is not immune from the rules that state that the substance of the village regulation should not be based on individual and group interests but must contain the interests of many people. The substance in the Ngadirenggo village village regulation also contains articles that are in accordance with the customs and habits of the community that are not contrary to the law so as not to cause conflicts in their implementation. The implementation of the Ngadirenggo Village regulation is monitored by the community and the community has the right to report to the BPD if there is a violation. (3) The implementation of village regulation legislation in Ngadirenggo village Wlingi

Blitar in the perspective of *Fiqh Siyasah* is appropriate and the maximization process is still in process. This can be seen from the performance of the village government and the BPD as *ahl al-hal wa al-aqd* when it accommodates the aspirations of the community and becomes a reference in a variety of issues including in making village regulation. In its own substance, the making of village regulation has also referred to Q.S Shura verse 38 which explains that the leaders should deliberate in determining a case concerned with the interests of the people so that the decisions that arise can be beneficial.

الملخص

البحث العلمي تحت العنوان "تصميم قانون القرية من حيث القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرية وفقه السياسة (دراسة الحالة في قرية نجادييرنججو و لينجي بليتار)" كتبته ل.م. الفارحة، رقم دفتر القيد 17104163037، قسم حكم إدارة البلد، كلية الشريعة وعلم الحكم، الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج، تحت إشراف الدكتور محمد دارين عارف مؤلفين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التصميمات، قانون القرية، فقه السياسة الدستورية.

خلفية هذا البحث العلمي هي الاضطرابات العامة حول عدم دقة عملية تصميم قانون القرية في قرية نجادييرنججو و لينجي بليتار. هذا لأنه وفقاً لرأي الناس، لا يفهم صانعو قانون القرية تماماً قواعد وضع النصوص الأكاديمية، وقواعد تنفيذ الصياغة القانونية والإدارة الحكومية في نطاق القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرية وفقه السياسة. في الواقع، فإن هذه القواعد لها أساس لإنتاج منتج قانوني جيد ووفقاً للقواعد التي وضعتها الحكومة. إذا كان تصنيع قانون القرية لا يتماشى مع القواعد المذكورة أعلاه (مادة متفوقة دروجت مادة أدنى) من حيث المضمون والعملية، فإن قانون القرية قد تكون لاغية وباطلة. هذا شيء مهم للغاية إذا حدث بالفعل لأنه قاعدة على اتصال مباشر مع حياة مجتمع القرية الذي يعد أصغر وحدة في النظام الحكومي في الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا. الواقع مثل هذا أمر مهم للحديث عنه لأنه ينطوي على الاستفادة من حياة الكثير من الناس والحصول على حل لما حدث.

مسائل هذا البحث هي: 1. كيف هي عملية التصميم قانون القرية في قرية نجادييرنججو و لينجي بليتار؟ 2. ما هي عملية التصميم قانون القرية في قرية نجادييرنججو و لينجي بليتار بناءً على القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرية؟ 3. ما هي عملية التصميم قانون القرية في قرية نجادييرنججو و لينجي بليتار على أساس الفقه سياسة؟

أهداف هذا البحث هي: 1. لمعرفة تصميم قانون القرية في قرية نجادييرنججو و لينجي بليتار مع القانون الحالية. 2. لمعرفة عملية صنع قانون القرية بواسطة جهاز قرية نجادييرنججو و لينجي بليتار على أساس القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرية. 3. لمعرفة عملية صنع قانون القرية من قبل جهاز قرية نجادييرنججو و لينجي بليتار على أساس فقه السياسة.

كانت طريقة البحث المستخدمة هي البحث الكيفي الوصفي باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. في هذا البحث كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلة والوثائق باستخدام تحليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

نتائج البحث تصميمات قانون القرية في قرية نجادييرنجو ويلينجي بليتار. (1) يبدأ تنفيذ تصميمات قانون القرية بما يلي: أ. المشورة الدائرية هنا مدخلات من واحد تلو الآخر يتم استيعاب المجتمع من قبل حكومة القرية، الهيئة الاستشارية للقرية، والزعماء الدينيين وقادة المجتمع. ب) المشورة القروية في مداوات القرية، تتم مناقشة جميع المدخلات الواردة من مودوس مرة أخرى من قبل حكومة القرية، الهيئة الاستشارية للقرية الزعماء الدينيين وقادة المجتمع ومن ثم التنسيق مع القانون العليا حتى لا يخرجوا من الممر ومبادئ تشكيل التصميمات، على الزعماء الدينيين في تشكيل قرية نجادييرنجو قانون القرية واجب تقديم مدخلات من خلال الإشارة إلى فقه سياسة في عدة الفصول. ج) يتم نشر مشروع قانون القرية الناتج عن مداوات القرية على المجتمع للحصول على مدخلات من المجتمع حول مضمونها. عندما يكون هناك مدخلات مضادة، سيتم تنقيحها مرة أخرى. د) سيتم إعادة كتابة تصميم قانون القرية التي تمت مشاركتها اجتماعيًا لتقديمها إلى مؤسسة عليا، أي الفرعية للموافقة عليها. هـ) يتم تنفيذ تصميم قانون القرية التي تم التصديق عليها باعتبارها قانون القرية من قبل حكومة القرية والمجتمع بأسره. في حالة حدوث انتهاك، يمكن للمجتمع إبلاغه إلى الهيئة الاستشارية للقرية لاتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل حكومة القرية. (2) إن تنفيذ تصميم قانون القرية من منظور القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرية يدل على أن التنفيذ مناسب، ويتم تنفيذه من خلال بدء المداوات بناءً على تطلعات الناس وقواعد سن التصميمات والإدارة الحكومية. ثم تابع تقديم تصميم قانون القرية وفقًا للإجراء، لا يمكن فصل هذا عن القواعد التي تنص على أن جوهر قانون القرية لا ينبغي أن يستند إلى مصالح الأفراد والجماعات ولكن يجب أن يحتوي على مصالح العديد من الأشخاص. تحتوي المادة في قرية نجادييرنجو قانون القرية أيضًا على مواد تتوافق مع عادات وعادات المجتمع التي لا تتعارض مع القانون حتى لا تتسبب في تعارضات في تنفيذها. تتم مراقبة تنفيذ قرية نجادييرنجو قانون القرية من قبل المجتمع، وللمجتمع الحق في تقديم تقرير إلى الهيئة الاستشارية للقرية إذا كان هناك انتهاك. (3) إن تنفيذ تصميم قانون القرية في قرية نجادييرنجو ويلينجي بليتار من منظور الفقه سياسة مناسب، وما زالت عملية التعظيم قيد التنفيذ. يمكن ملاحظة ذلك من خلال أداء حكومة القرية والهيئة الاستشارية للقرية كأهل الوعد عندما

تستوعب تطلعات المجتمع وتصبح مرجعًا في مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك صنع قانون القرية. في جوهره، أشار صنع قانون القرية أيضًا إلى سورة الشورى الآية 38 التي تشرح أنه يجب على القادة التداول في تحديد قضية تتعلق بمصالح الأشخاص حتى تكون القرارات التي تنشأ مفيدة.